

## PERAN TEORI DIFUSI INOVASI DALAM MENGATASI TANTANGAN IMPLEMENTASI PSAK 55 DI BANK PEKREDITAN RAKYAT

Chairanisa Natasha Miraza<sup>1)</sup>, Cut Darmawati<sup>2)</sup>, Abdul Malik Fajri<sup>3)</sup>, Riantari Maharani<sup>4)</sup>,  
Aulia Khairullah<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala

<sup>1</sup>email: [cnatasha@usk.ac.id](mailto:cnatasha@usk.ac.id) <sup>2</sup>email: [cut.darmawati@usk.ac.id](mailto:cut.darmawati@usk.ac.id) <sup>3</sup>email: [malikfajri@usk.ac.id](mailto:malikfajri@usk.ac.id)

<sup>4</sup>email: [riantarimaharani@usk.ac.id](mailto:riantarimaharani@usk.ac.id) <sup>5</sup>email: [aulia.khairullah@usk.ac.id](mailto:aulia.khairullah@usk.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to provide recommendations for addressing the challenges that arise in the implementation of PSAK 55 in Rural Banks (BPR). The research employs a descriptive qualitative approach using interview techniques, analyzed with NVivo12 Pro software through content analysis, thematic analysis, and constant comparative methods. The findings reveal several key obstacles, including limited human resource competence in calculating the fair value of collateral and estimating future cash flows, both of which are essential for determining CKPN (Allowance for Impairment Losses). These challenges are further exacerbated by doubts among many BPR practitioners regarding the effectiveness of PSAK 55 in reducing credit risk losses, as the standard has never been implemented in the BPR sector before. In response to these barriers, this study offers strategic recommendations based on the Diffusion of Innovation Theory, including enhanced dissemination of information about PSAK 55, strengthened collaboration among BPRs through peer support mechanisms—such as initiatives by BPRKU 3 to assist BPRKU 1 and 2 by providing CKPN calculation templates and technical training and active regulatory involvement in promoting broader acceptance of the standard. Accordingly, this research contributes conceptually by applying the Diffusion of Innovation Theory to explain the adoption process of PSAK 55 within the practical context of BPRs. It also provides practical contributions by offering actionable recommendations that can be used by professional associations to design training and outreach programs, and by BPRs to prepare internal strategies for more effective implementation of PSAK 55.*

**Keywords:** Rural Banks (BPR); PSAK 55; Diffusion Theory of Innovation; Nvivo12 Pro

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam mengatasi kendala yang muncul dalam implementasi PSAK 55 pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, yang dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo12 Pro melalui metode analisis konten, tematik, serta *constant comparative*. Hasil penelitian ini mengungkapkan sejumlah hambatan utama, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam menghitung nilai wajar agunan, serta memperkirakan arus kas masa depan yang menjadi dasar dalam perhitungan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Kendala tersebut diperparah oleh keraguan sebagian besar pelaku di BPR terhadap efektivitas PSAK 55 dalam mengurangi risiko kerugian dari kredit bermasalah, karena standar ini belum pernah diimplementasikan sebelumnya di sektor BPR. Sebagai tanggapan atas hambatan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis yang didasarkan pada Teori Difusi Inovasi yaitu dengan cara peningkatan diseminasi informasi mengenai PSAK 55, penguatan kolaborasi antar BPR melalui skema *peer support* seperti inisiatif BPRKU 3 dalam membantu BPRKU 1 dan 2 melalui penyediaan template perhitungan CKPN dan pelatihan teknis, serta peran aktif regulator dalam mendorong keterterimaan standar ini secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui penerapan Teori Difusi Inovasi untuk menjelaskan proses adopsi PSAK 55 dalam konteks praktik di BPR. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan menghasilkan rekomendasi implementatif yang dapat digunakan oleh asosiasi profesi untuk merancang program pelatihan dan sosialisasi, serta oleh BPR untuk menyiapkan strategi internal dalam menghadapi penerapan PSAK 55 secara lebih efektif.

**Kata Kunci:** BPR; PSAK 55; Teori Difusi Inovasi; Nvivo 12 Pro

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai entitas jasa keuangan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diwajibkan menerapkan standar akuntansi sebagai acuan dalam pencatatan akuntansi yang tepat. SE BI No. 11/37/DKBU Tahun 2009 mengizinkan BPR untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang mensyaratkan BPR untuk membentuk cadangan atas penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) bagi BPR. Namun, SAK ETAP memiliki beberapa kelemahan, seperti dianggap terlalu sederhana bagi entitas berskala besar seperti BPR, tetapi terlalu kompleks untuk diterapkan oleh entitas kecil dan menengah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) pada 29 Juli 2020 sebagai revisi terhadap SAK ETAP (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). SAK EP merupakan standar akuntansi yang diadopsi dari IFRS untuk UKM 2015 oleh DSAK-IAI, yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025, dengan penerapan lebih awal diperbolehkan sejak 2022 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020b). SAK EP terdiri dari 35 bab yang mencakup berbagai perbedaan dibandingkan dengan SAK ETAP, salah satunya terkait perlakuan akuntansi untuk instrumen keuangan. SAK EP memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan persyaratan dalam Bab 11 dan Bab 12 secara penuh atau menggunakan Standar Akuntansi Indonesia PSAK 55 dengan tetap mengacu pada pengungkapan dalam Bab 11 dan Bab 12 SAK EP (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021).

PSAK 55 merupakan standar akuntansi yang diadopsi dari *International Accounting Standard* (IAS) 39, yang bertujuan mengatur prinsip dasar dalam pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, serta kontrak untuk membeli atau menjual barang

non-keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Selain itu, PSAK 55 mengatur perlakuan akuntansi untuk penyisihan penurunan nilai dalam bentuk kerugian kredit yang terjadi (*incurred credit losses*), yang berbeda dengan perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) berdasarkan POJK No. 33/POJK.03/2018. Dalam PSAK 55, terdapat dua jenis penurunan nilai, yaitu penurunan nilai secara individu dan kolektif (KPMG, 2007).

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat BPR yang lebih memilih pencatatan akuntansi yang sederhana dan mengabaikan standar akuntansi yang berlaku karena keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (Auliyah, 2012; Mulyani, 2013; Rudiantoro & Siregar, 2011; Safri, 2013). Oleh karena itu, perhitungan penurunan nilai dalam PSAK 55 berpotensi menghambat penerapan PSAK 55 di BPR. Penelitian ini memperluas studi sebelumnya dengan menganalisis kesiapan dan tantangan dalam menerapkan PSAK 55 di BPR. Penelitian ini menggunakan Teori Difusi Inovasi guna menemukan dan memberikan solusi dalam mengatasi tantangan dalam implementasi PSAK 55 di BPR.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian terdahulu masih menggunakan Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 sebagai dasar dalam pembentukan penyisihan penurunan nilai instrumen keuangan di BPR (Supeno, 2015), sedangkan penelitian ini menggunakan PSAK 55 yang dianggap lebih objektif dan andal dalam menghitung penyisihan kerugian penurunan nilai di BPR.

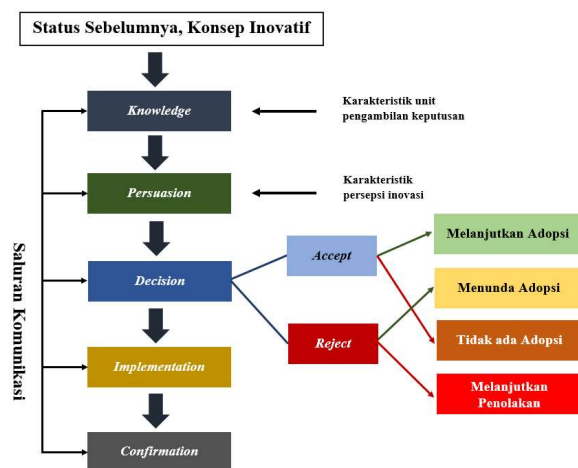
Kedua, penelitian sebelumnya hanya membahas dampak penerapan IAS 32 dan IAS 39 pada bank komersial di Hong Kong dan Indonesia (Abdul Adzis et al., 2016; Sparta & Trinova, 2020), sedangkan penelitian ini berfokus pada tantangan implementasi PSAK 55 di BPR. Ketiga, penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi untuk memberikan rekomendasi terkait tantangan dalam implementasi PSAK 55 di BPR.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Teori Difusi Inovasi

Teori Difusi Inovasi pertama kali ditemukan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962. Difusi merujuk pada suatu proses yang mengkomunikasikan suatu inovasi melalui saluran tertentu kepada seluruh anggota dalam suatu sistem sosial (Rogers, 1995 dalam Gunarathne & Senaratne, 2017). juga mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide, praktik atau benda yang dipersepsikan sebagai hal baru oleh individu (Shaikh et al., 2019). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Teori Difusi Inovasi merupakan teori yang membahas mengenai suatu proses terciptanya ide atau aktivitas baru yang diadopsi dan didistribusikan kepada seluruh anggota dalam sistem sosial melalui saluran tertentu.

Rogers (1962) dalam (Hsu & Cheng, 2012) mengembangkan Teori Difusi Inovasi melalui sebuah model yang bernama *Innovation-Adoption* yang membagi proses adopsi menjadi lima tahap, yaitu pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi seperti yang ditampilkan pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1. Tahapan Adopsi dalam Teori Difusi Inovasi**

Sumber: Rogers (1962) dalam Hsu dan Cheng (2012) yang telah diolah oleh penulis (2025)

Gambar diatas menunjukkan tahap pengetahuan dalam model ini merupakan tahapan dimana seseorang mengetahui adanya inovasi dan mulai memahaminya lebih lanjut (Rogers, 2003, dalam Shaikh et al., 2019). Selanjutnya, persuasi merupakan tahapan di mana individu tersebut mulai mendukung atau tidak inovasi

tersebut berdasarkan karakteristik persepsi inovasi. Rogers, 1995) dalam Hsu & Cheng, (2012) membagi karakteristik persepsi inovasi tersebut menjadi 5 (lima) karakteristik, yaitu keunggulan relatif, kompabilitas, kompleksitas, pengamatan, dan uji coba. Keunggulan relatif merujuk pada tingkat peningkatan manfaat yang diyakini dapat menciptakan suatu inovasi. Sedangkan kompatibilitas merujuk pada tingkat konsistensi dengan kebutuhan, nilai, dan norma yang diyakini dapat dihasilkan dari adanya inovasi. Adapun kompleksitas dikaitkan dengan tingkat pemahaman dan kelayakan inovasi. Pengamatan merupakan suatu tingkat inovasi dan manfaat yang dapat diamati oleh pengadopsi potensial. Selain itu, uji coba merupakan tingkat eksperimen yang dapat dilakukan dengan menerapkan inovasi tersebut.

Tahapan selanjutnya ialah keputusan yang merupakan suatu tahapan dimana suatu individu mulai memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi setelah terlibat dalam kegiatan terkait inovasi tersebut (Rogers, 2003 dalam Shaikh et al., 2019). Sementara itu, implementasi merupakan tahapan dimana seorang individu memutuskan untuk menerima dan menerapkan inovasi tersebut di dalam sistem sosial. Sedangkan, konfirmasi merupakan tahapan dimana seorang individu mengintegrasikan keputusan atas diterima atau ditolaknya suatu inovasi jika terdapat informasi yang bertentangan dengan kenyataannya.

Teori Difusi Inovasi ini dapat membantu permasalahan BPR dalam menganalisis solusi yang dapat diberikan untuk mengurangi logika dominan atas praktik *decoupling* terhadap penerapan PSAK 55 di BPR. Berdasarkan kategori BPR yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016, BPR yang berada dalam kategori BPRKU 3 dapat menjadi contoh dalam perhitungan CKPN atas instrumen keuangan untuk seluruh BPR yang berada dalam kategori BPRKU 1 dan 2 dengan membuat suatu *template* dan edukasi terkait proses perhitungan CKPN tersebut.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan

1. Responden A dari BPR ABC,
2. Responden B dari BPR EFG, dan
3. Responden C dari BPR XYZ.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis konten, analisis tematik dan analisis perbandingan konstan dari hasil data wawancara dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 Pro.

1. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi kata-kata yang paling sering muncul dan mencerminkan perhatian responden terhadap pertanyaan penelitian berdasarkan data dari kuesioner dan transkrip wawancara.
2. Analisis tematik digunakan untuk menghasilkan tema utama (nodes) dan sub-tema (child nodes) guna mengidentifikasi serta mengklasifikasikan data hasil transkrip wawancara ke dalam beberapa tema (Braun dan Clarke, 2006 dalam (Vaismoradi et al., 2013)).
3. Analisis perbandingan konstan digunakan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara, sehingga penelitian ini dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam jawaban responden. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan variasi jawaban serta menghasilkan analisis yang lebih kaya dan mendalam (Shauki, 2018).



PPAP berdasarkan POJK No. 33/POJK.03/2018 . Kesulitan perhitungan ini berkaitan dengan metode antara PSAK 55 dan PPAP yang mengharuskan BPR melakukan perhitungan individual dan kolektif atas penurunan nilai asset keuangan Seperti kutipan pada salah satu wawancara dengan narasumber berikut ini: *“perhitungannya (PSAK 55) juga tidak sederhana PPAP berdasarkan POJK 33. Jadi yang saya baca, standar akuntansi yang paling sesuai dengan BPR ya SAK ETAP. Ditambah saya dan teman-teman di BPR juga kurang familiar dengan PSAK 55. Jadi kesulitannya saya rasa ada di elemen-elemen yang dibutuhkan untuk perhitungan pencadangannya jadi harus melihat dan menyesuaikan lagi kelengkapan-kelengkapan datanya. Kalau PPAP yang sekarang ini kan tidak banyak elemen-elemen yang dibutuhkan untuk perhitungannya.”* (Narasumber A, 2023).

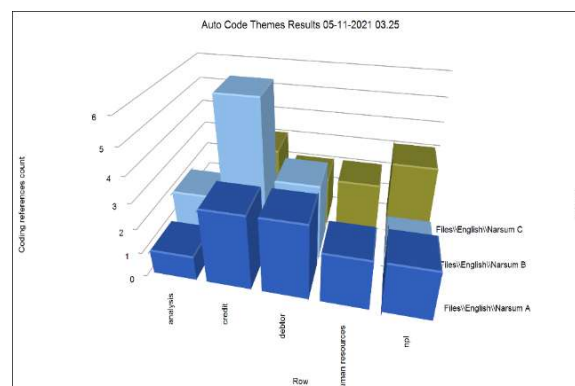
*“Mungkin dari perhitungannya yang lebih rumit dan prosesnya lebih panjang, tidak bisa cuma langsung mencadangkan senilai 0,5%...”* (Narasumber B, 2023).

Kata selanjutnya yaitu “system”, menunjukkan Keterbatasan Sistem Perbankan Inti (*Core Banking System*). Beberapa BPR menyatakan bahwa sistem perbankan inti mereka belum mampu mengakomodasi perhitungan CKPN berdasarkan PSAK 55, sehingga membutuhkan pembaruan sistem yang berpotensi meningkatkan biaya operasional. Seperti kutipan berikut ini *“Sistem yang ada saat ini belum bisa langsung support PSAK 55, jadi perlu ada pembaruan lagi.”* (Narasumber C, 2023). Peraturan juga menjadi kata yang sering disebutkan oleh para responden. Banyak responden yang merasa kurang memahami peraturan terkait PSAK 55, karena belum pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi mengenai standar akuntansi ini. Kutipan wawancara *“Saya kurang tahu bagaimana dengan direksi. Tapi saya dan rekan-rekan saya di BPR ini belum pernah mendapat informasi dari pemerintah maupun direksi, jadi PSAK 55 masih asing buat kita.”* (Narasumber A, 2023).

### Analisis Tematik

Teknik analisis selanjutnya yang digunakan untuk mengolah hasil wawancara yaitu analisis tematik melalui menu *autocode* pada aplikasi

NVivo12 Pro untuk mengidentifikasi tema yang dibahas oleh setiap responden yang relevan dalam penelitian ini. Kemudian, dari menu *autocode* tersebut akan menghasilkan tema (*nodes*) dan sub-tema (*child notes*).



**Gambar 4.2. Hasil Analisis Tematik**

Sumber: Data yang diolah oleh penulis menggunakan Nvivo12 Pro (2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden salah satu factor tantangan implementasi PSAK 55 adalah ketidakpahaman BPR mengenai perhitungan pencadangan atau CKPN atas instrumen keuangan berdasarkan PSAK 55.

*“...Selama ini yang saya tahu itu SAK ETAP, tapi PSAK 55 ini saya tidak tahu sama sekali ...”* (Narasumber A, 2023).

*“Saya pernah mendengar (PSAK 55) saat saya mampir ke pusat. Tapi saya belum mempelajari apa itu PSAK 55. Yang saya tahu SAK ETAP karena kita pakai di sini...”* (Narasumber B, 2023).

*“Sejujurnya saya belum paham tentang PSAK 55. Mendengar mungkin sudah pernah, tapi kalau untuk memahami belum...”* (Narasumber C, 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga narasumber merasa lebih familiar dan memahami standar akuntansi SAK ETAP dan persyaratan perhitungan PPAP berdasarkan POJK No. 33/POJK.03/2018. Di sisi lain, 2 (dua) narasumber mengatakan bahwa mereka hanya pernah mendengar namun tidak memahami PSAK 55. Bahkan 1 (satu) narasumber mengatakan bahwa narasumber tersebut tidak tahun apapun mengenai PSAK 55. Hal tersebut salah satunya disebabkan

karena tidak adanya informasi dari pemerintah dan pihak yang berwenang untuk menyusun peraturan, seperti OJK dan IAI terkait adanya penerapan PSAK 55 di BPR yang efektif pada 1 Januari 2025.

*“...Saya dan rekan-rekan saya di BPR ini belum pernah mendapat informasi dari pemerintah maupun direksi jadi PSAK 55 masih asing buat kita.”* (Narasumber A, 2023).

*“Sejauh ini belum ada info apapun tentang PSAK 55. Saya sudah tanya ke teman-teman di sini pun belum ada yang tahu.”* (Narasumber C, 2023).

Selain itu, faktor lainnya yang menjadi tantangan dalam implementasi PSAK 55 adalah penerapan PSAK 55 yang dipandang belum sesuai dengan kondisi yang ada di BPR di mana biaya yang diperlukan untuk menerapkan PSAK 55 lebih besar jika dibandingkan dengan manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, terdapat keraguan dari narasumber selaku aktor untuk menerapkan PSAK 55 di BPR.

*“Ada satu artikel yang saya baca mengatakan kalau PSAK 55 ini masih belum sesuai untuk diterapkan di BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh ... Jadi yang saya baca, standar akuntansi yang paling sesuai dengan BPR yaitu SAK ETAP.”* (Narasumber A, 2023).

Di samping itu, terdapat beberapa kesulitan atau kendala yang diprediksi akan dihadapi oleh BPR pada saat menerapkan PSAK 55. Perhitungan pencadangan atau CKPN atas

instrumen keuangan berdasarkan PSAK 55 dianggap rumit dan kompleks jika dibandingkan dengan perhitungan PPAP berdasarkan POJK No. 33/POJK.03/2018 di mana PSAK 55 membutuhkan elemen-elemen dalam perhitungan serta data-data yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga terjadi *decoupling* terhadap PSAK 55 dan lebih memilih untuk mengikuti SAK ETAP dan POJK No. 33/POJK.03/2018.

*“... Kesulitannya saya rasa ada di elemen-elemen yang dibutuhkan untuk perhitungan pencadangannya jadi harus melihat dan menyesuaikan lagi kelengkapan-kelengkapan datanya. Kalau PPAP yang sekarang ini kan tidak banyak elemen-elemen yang dibutuhkan untuk perhitungannya.”* (Narasumber A, 2023).

*“Mungkin dari perhitungannya yang lebih rumit dan prosesnya lebih panjang, tidak bisa langsung mencadangkan senilai 0,5% misalkan karena harus diperhatikan juga komponen-komponen lainnya seperti PD, LGD dan yang satu lagi...”* (Narasumber B, 2023).

*“Saya belum paham PSAK 55, tapi mungkin perhitungan di PSAK 55 jauh lebih kompleks daripada POJK 33.”* (Narasumber C, 2023).

### Analisis Konstan Komparatif

Analisis ini membandingkan jawaban responden dan narasumber mengenai tantangan PSAK 55 dan solusinya melalui Teori Difusi Inovasi.

**Tabel 1. Hasil Wawancara**

Uraian	Narasumber A	Narasumber B	Narasumber C
Pemahaman PSAK 55	Tidak familiar	Pernah dengar namun tidak memahami	Tidak memahami
Kesulitan Utama	Perhitungan CKPN yang lebih kompleks	Sistem belum siap untuk perhitungan CKPN	SDM belum siap
Solusi	Sosialisasi oleh OJK dan IAI	Penyusunan template perhitungan	Bantuan teknis dari BPRKU 3
Respon terhadap penerapan PSAK 55	Akan mengikuti jika diwajibkan	Akan mengikuti jika ada pelatihan	Akan mengikuti jika sistem sudah mendukung

Sumber: Data wawancara yang telah diolah kembali oleh penulis (2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua narasumber tidak familiar dengan PSAK 55, meskipun dua di antaranya pernah mendengar standar tersebut. Mereka menganggap perhitungan dalam PSAK 55 lebih kompleks dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan

POJK No. 33/POJK.03/2018. Ketiga narasumber sepakat bahwa persiapan utama untuk implementasi PSAK 55 adalah peningkatan pemahaman sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan oleh OJK atau IAI.

“...persiapan terpenting adalah pemahaman mengenai PSAK 55 secara mendalam dan aplikasinya di BPR. Kita harus tahu apa saja yang harus dipersiapkan, data-data apa saja yang dibutuhkan.” (Narasumber A, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan tantangan utama dalam implementasi PSAK 55 di BPR meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami dan menganalisis bukti objektif penurunan nilai, menghitung nilai wajar agunan, serta nilai arus kas masa depan.
2. Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait PSAK 55 dari pihak regulator, menyebabkan ketidaksiapan BPR dalam menerapkan standar ini.
3. Kesulitan dalam perhitungan CKPN individu dan kolektif, karena sistem perbankan inti (*core banking system*) belum mampu mengakomodasi ketentuan dalam PSAK 55.
4. Persepsi bahwa biaya implementasi PSAK 55 lebih besar dibandingkan manfaatnya, sehingga beberapa BPR lebih memilih tetap menggunakan POJK No. 33/POJK.03/2018.

“...perhitungan dalam PSAK 55 lebih kompleks dan membutuhkan banyak elemen, sehingga sulit diterapkan di BPR.” (Narasumber C, 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam implementasi PSAK 55 yang ditemukan dari hasil wawancara ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ketidakpahaman aktor terhadap PSAK 55, PSAK 55 yang belum sesuai dengan kondisi BPR, dan perhitungan yang dipersyaratkan dalam PSAK 55 dipandang lebih sulit dan kompleks dibandingkan SAK ETAP dan POJK No. 33/POJK.03/2018. Ketiga faktor tersebut yang menyebabkan timbulnya konflik antara *symbolic carriers* dan *material carriers*, sehingga mendorong terjadinya *decoupling* terhadap penerapan PSAK 55 di BPR.

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi PSAK 55 pada BPR, penelitian ini mengusulkan penerapan Teori Difusi Inovasi yang dikembangkan oleh Everett Rogers menjadi pendekatan yang sangat relevan dan strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penerapan Teori Difusi Inovasi bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam implementasi PSAK 55 dengan membantu mereka memahami, menerima, dan menerapkan standar ini secara bertahap. Teori ini menggambarkan bagaimana sebuah inovasi (dalam hal ini PSAK 55) disebarluaskan dalam suatu sistem sosial dari waktu ke waktu melalui proses lima tahapan: pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi.

#### 1. Tahap Pengetahuan: Menjembatani Asimetri Informasi

Masalah utama yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya informasi dan pemahaman tentang PSAK 55 di kalangan BPR, terutama BPRKU 1 dan 2. Ketiadaan sosialisasi formal dari regulator maupun asosiasi profesi menyebabkan standar ini dianggap asing dan teknis. Narasumber A menyatakan:

“Saya dan rekan-rekan di BPR ini belum pernah mendapat informasi dari pemerintah maupun direksi, jadi PSAK 55 masih asing buat kita.” (Narasumber A, 2023)

Dalam kerangka Teori Difusi Inovasi, fase pengetahuan menjadi titik awal penting untuk membongkar ketidaktahuan dan resistensi awal. Oleh karena itu, teori ini mendorong penyebaran informasi yang terstruktur dan disesuaikan dengan kapasitas audiens. Pemerintah, OJK, dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dapat berperan sebagai *change agents* yang memperluas jangkauan informasi, tidak hanya dalam bentuk seminar, tetapi juga dengan menyusun modul pembelajaran berbasis praktik terbaik (*best practices*) yang mudah dipahami oleh BPR.

#### 2. Tahap Persuasi: Menginternalisasi Manfaat

Setelah BPR menerima informasi, mereka mulai mengevaluasi inovasi dari perspektif nilai-nilai organisasi mereka. Banyak BPR meragukan efektivitas PSAK 55 karena perhitungannya kompleks dan belum pernah diterapkan sebelumnya. Namun, bagi mereka yang telah melihat manfaat akuntansi berbasis nilai kini (*fair value*) terhadap pencadangan kerugian kredit, terjadi perubahan sikap ke arah yang lebih terbuka. Ini menunjukkan bahwa narasi keberhasilan dan demonstrasi manfaat (misalnya melalui studi kasus atau *benchmarking*) sangat penting dalam tahap persuasi.

Pada tahap ini, peran *early adopters* seperti BPRKU 3 sangat krusial. Mereka bisa dijadikan agen perubahan yang memperkuat argumen bahwa PSAK 55 bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga investasi jangka panjang dalam meningkatkan ketahanan keuangan BPR terhadap risiko kredit.

3. Tahap Keputusan: Mengatasi Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Kapasitas BPR berada pada titik kritis ketika harus memilih antara tetap dengan metode PPAP berdasarkan POJK atau beralih ke PSAK 55. Banyak BPR yang mengalami decoupling, yaitu ketidaksesuaian antara norma regulasi dengan praktik aktual karena keterbatasan SDM dan infrastruktur. Dalam konteks TDI, resistensi ini dapat dikurangi dengan menyediakan *relative advantage* yang jelas dan *trialability* (kesempatan untuk mencoba secara terbatas tanpa risiko besar).

Misalnya, pilot project implementasi PSAK 55 dapat diterapkan pada kelompok BPR tertentu, dengan dukungan teknis penuh dari regulator dan BPRKU 3. Keputusan untuk mengadopsi inovasi biasanya bergantung pada persepsi manfaat dibandingkan dengan biaya. Oleh karena itu, jika BPR dapat melihat bahwa template CKPN yang diberikan oleh BPRKU 3 menyederhanakan proses perhitungan dan mendekatkan mereka pada kepatuhan, maka kemungkinan adopsi meningkat signifikan.

4. Tahap Implementasi: Perluasan Kolaboratif dan Dukungan Teknis

Pada tahap ini, banyak BPR mengalami kendala teknis, seperti sistem perbankan inti yang belum kompatibel dengan metode *impairment* PSAK 55. Teori Difusi Inovasi mendorong *reinvention* atau adaptasi inovasi agar sesuai dengan konteks lokal. Penyusunan template perhitungan CKPN oleh BPRKU 3, seperti yang dijelaskan oleh Narasumber C, menjadi contoh nyata:

“...template pasti akan lebih memudahkan kami untuk mempelajari perhitungan CKPN di PSAK 55 dengan baik.” (Narasumber C, 2023)

Hal ini menunjukkan bahwa solusi berbasis kolaborasi antarlembaga dapat mempercepat proses adopsi. BPRKU 3 bertindak sebagai *opinion leader* yang mentransfer inovasi kepada BPRKU 1 dan 2 melalui pendekatan praktis, bukan sekadar penyuluhan konseptual.

5. Tahap Konfirmasi: Menumbuhkan Kepercayaan dan Keberlanjutan

Setelah implementasi, BPR perlu melakukan evaluasi untuk memperkuat keputusan mereka dan mencegah *discontinuance* (penghentian inovasi). Dalam konteks ini, peran TDI adalah membangun mekanisme umpan balik dari BPR ke regulator dan asosiasi. Ini menciptakan lingkaran pembelajaran berkelanjutan di mana inovasi tidak hanya diterapkan tetapi juga disempurnakan. Konsultasi reguler dengan IAI, pelatihan berkelanjutan, dan audit atas kualitas implementasi menjadi elemen penting untuk menjaga keberlanjutan.

Teori Difusi Inovasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami pola adopsi PSAK 55 di BPR, tetapi juga menawarkan solusi sistemik yang berbasis tahapan, aktor sosial, dan konteks institusional. Melalui penyebaran informasi yang tepat sasaran, fasilitasi keputusan berbasis data, dan kolaborasi antarlembaga, teori ini menjadi kerangka kerja strategis dalam mengatasi tantangan implementasi PSAK 55. Dengan demikian, adopsi PSAK 55 tidak lagi menjadi beban regulatif, tetapi bagian dari transformasi kelembagaan BPR menuju tata kelola yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kualitas informasi keuangan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Teori Difusi Inovasi secara efektif dapat mengatasi tantangan implementasi PSAK 55 pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tahapan dalam teori ini—pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi—memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam memahami dan menangani hambatan yang dihadapi BPR, seperti keterbatasan informasi, kapasitas teknis, dan resistensi terhadap perubahan.

Pada tahap pengetahuan, ditemukan bahwa sebagian besar BPR belum memahami PSAK 55 secara memadai, yang menjadi akar kesulitan dalam implementasi. Melalui penyebaran informasi yang tepat dan edukasi berkelanjutan, BPR dapat lebih siap secara konseptual. Tahap persuasi memperkuat kesadaran akan manfaat PSAK 55, terutama dalam meningkatkan akurasi pencadangan kerugian kredit. Ini



membuka peluang bagi BPR untuk mulai mengadopsi standar secara lebih terbuka.

Tahap keputusan mengungkap adanya perbedaan sikap antar-BPR, di mana beberapa masih enggan beralih dari pendekatan POJK dan SAK ETAP. Namun, dengan adanya pemahaman yang lebih baik serta dukungan regulator, adopsi PSAK 55 menjadi lebih memungkinkan. Implementasi menghadirkan tantangan teknis seperti keterbatasan sistem perbankan inti, namun pendekatan kolaboratif antar-BPR, seperti berbagi template CKPN dan pelatihan bersama, dapat menjadi solusi praktis. Pada tahap konfirmasi, keberlanjutan implementasi PSAK 55 bergantung pada evaluasi rutin dan keterlibatan aktif BPR dengan asosiasi profesi serta regulator untuk mendapatkan bimbingan. Hal ini penting agar adaptasi terus disempurnakan sesuai perkembangan regulasi dan praktik akuntansi. Prospek pengembangan ke depan meliputi penguatan sinergi antar-BPR dalam pengembangan teknologi, pelatihan bersama, serta pendampingan teknis dari pihak eksternal. Selain itu, studi lanjutan dapat menggali efektivitas difusi inovasi pada standar akuntansi lainnya atau sektor lembaga keuangan mikro lain.

Dengan demikian, Teori Difusi Inovasi bukan hanya relevan tetapi juga strategis dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi dan kapasitas implementasi di BPR, sehingga mendorong tata kelola yang lebih akuntabel dan berkelanjutan

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga kepada responden A, B, C dari BPR yang telah bersedia diwawancarai sehingga penelitian ini bisa selesai dan memberikan Solusi bagi BPR untuk mengatasi tantangan implementasi PSAK tersebut.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Adzis, A., Tripe, D. W. L., & Dunmore, P. (2016). IAS 39, income smoothing, and pro-cyclicality: evidence from Hong Kong banks. *Journal of Financial Economic Policy*, 8(1), 80–94. <https://doi.org/10.1108/JFEP-05-2015-0026>

Auliyah, I. M. (2012). *Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UKM Kampung Batik di Sidoarjo*. STIE Perbanas.

Bank Indonesia. (2009). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU Tahun 2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Bank Indonesia: Jakarta.

Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Bank Indonesia Regulation.

Gunarathne, N., & Senaratne, S. (2017). Diffusion of integrated reporting in an emerging South Asian (SAARC) nation. *Managerial Auditing Journal*, 32(4/5), 524–548. <https://doi.org/10.1108/MAJ-01-2016-1309>

Hsu, J., & Cheng, M. (2012). What Prompts Small and Medium Enterprises to Engage in Corporate Social Responsibility? A Study from Taiwan. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 19(5), 288–305. <https://doi.org/10.1002/csr.276>

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. In *Ikatan Akuntan Indonesia*.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Dengar Pendapat Publik (Public Hearing) Draf Eksposur SAK Entitas Privat*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Draf Eksposur Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Privat*.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Standar Akuntansi Entitas Privat*.

Kasmuri, S., & Shauki, E. R. (2019). Decision-Making Behavior of Loan Restructuring based on Institutional Logics: Case Study Bank Perkreditan Rakyat Industry in West Java Region. *AFEBI Accounting Review*, 4(1). <http://dx.doi.org/10.47312/aar.v4i01.219>

- KPMG. (2007). *Loan Impairment Modeling According to IAS 39 by Using Basel II Parameters*.
- Mulyani. (2013). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjungpinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjungpinang*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Focus Group Discussion Persiapan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat oleh BPR: Perkembangan Kondisi Terkini BPR dan Evaluasi Implementasi SAK ETAP oleh BPR
- Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of Innovations*. Free Press.
- Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of Innovations (4th Ed.)*. Free Press.
- Rogers, E. M. (2003). (2003). *Diffusion of Innovations (5th Ed.)*. Free Press.
- Rudiantoro, R., & Siregar, V. (2011). Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*.
- Safri, M. , A. (2013). Implementasi SAK ETAP dalam Menyusun Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kripik Wak Jember. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 2(2).
- Shaikh, I. M., Bin Noordin, K., Arijio, S., Shaikh, F., & Alsharief, A. (2019). Predicting customers' adoption towards family *takaful* scheme in Pakistan using diffusion theory of innovation. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1761–1776. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2018-0037>
- Shauki, E. R. (2018). Qualitative and Mixed-Method Research Analysis Using Nvivo11. *Handout, Case Writing and Methodology*, 809303.
- Sparta, S., & Trinova, N. (2020). The Factors Affecting The Bank's Credit Impairment Losses by Adopting IAS on PSAK 55 in Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3).
- Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content Analysis and Thematic Analysis: Implications for Conducting A Qualitative Descriptive Study. *Nursing and Health Sciences*, 15(3), 398–405.